

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Zeithaml, V. Parasuraman, A and L. Berry L. (1985). Problems and Strategies in Service Marketing" Journal of Marketing. Vol 49. (Spring)
- Anas, Heriyanto. (2015). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. 1-65. Universitas PGRI Yogyakarta
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2013). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. 61-68. Jakarta: Refika Aditama.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. 1-410. Jakarta: Rajawali Pers.
- Achmad, Daniri. (2006). *Konsep dan Penerapan Good Governance dalam Konteks Indonesia*. 1-203. Jakarta: Ray Indonesia.
- Ayu Arina. Ida. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi: FEBIS Universitas Udayana*. Vol. 27 No.1. 568-593
- Creswell, J. W. (2016). *Rearth Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. 1-383. Pustaka Belajar.
- Dwiyanto. A. (2021). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. 1-432. Gadjah Mada University Press.Yogyakarta
- Esman, J.M. (1991). Management Dimension of Development Perspectives and Strategies. Kumarian Press. 1-122
- Fitzsimmons, James A. Fitzsimmons, Mona J. (1994). Service Management for Competitive, Advantage, Mc. Graw Hill Companies, Inc. 1-462
- Fransisca, Maria. (2017). *Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul)*. 1:125. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Gunawan Sumodiningrat. (2004). Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. 1-334. Gramedia. Jakarta: Pustaka Utama.
- Habibi, M. M., Iza, I. N. ., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.21371>. 88-99
- Hasibuan. (2008). Eletronic Government for Good Governance. *Jurnal System Informasi dan Manajemen Teknologi Informasi*. Volume (1). 3-4
- Kaloh. (2010). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. PT Rineka Cipta: Jakarta.

- Kusnadi, dkk. (2005). Pendidikan Keaksaraan; Filosofi, Strategi dan Implementasi. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Mohammad. (2003). Masalah pelayanan publik di Indonesia dalam perspektif Administrasi Negara. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. Volume (2)1
- Pasolong, Harbani. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Salam, Dharma Setyawan. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Said, M. Mas'ud. (2012). *Birokrasi Di Negara Birokratis*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Cetakan Kelima*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sinambella. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. 1-159. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugandi, Yogi Suprayogi. (2011). *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. 1-238. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 1-334.
- Sugiyono, D (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 1-546. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. 1-280. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tangklisan, Nogis. (2005). *Manajemen Publik*. 1-345. Jakarta: Grasindo.
- Thoha. Miftah. (2014). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. 1-311. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, dkk, (2004). *Birokrasi Dalam Polemik*. 1-115. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tompo, dkk. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. *Journal Public Policy and Management*. Vol. 3. No. 1. 43-52
- Utomo, Warsito. (2007). *Administrasi Publik Baru di Indonesia*. 1-282. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Weny, Dongga. A., Tome, Abdul Hamid. (2017). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintah Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 11. No 1. 1-15
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. 1-186. Malang: Bayumedia
- Yuliana, S. (2018). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di Bidang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. Vol 5(2). 108-114. Dinamika. Universitas Galuh, Ciamis.
- Zullkarnain. (2002). *Kendala Terwujudnya Good Governance*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## LAMPIRAN

Dokumentasi bersama informan di Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten

Majene



Dokumentasi bersama informan di Desa Bababulo









**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPM-PTSP)  
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 500.16.7.2/037/IP/1/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/037/1/2024 Tanggal 23 Januari 2024 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: NUR AFIFAH SUADI
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: E062222008
Program Study/Jurusan	: S2 Ilmu Pemerintahan
Universitas	: Universitas Hasanuddin
Alamat	: Dusun Bababulo Kel. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BABABULO KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
Pada Tanggal : 29-01-2024  
Kepala Dinas



**H. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.**  
Pangkat, Pembina Utama Muda  
Nip. 196809281992032011



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245  
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024  
Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 167 /UN4.8.1/PT.01.04/2024  
Lamp. : Proposal Penelitian  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

8 Januari 2024

Kepada Yth :  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Majene

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Afifah Suadi  
Nomor Pokok : E062222008  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bababulo Kabupaten Majene

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.  
2. Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si.

Waktu Penelitian : 8 Januari 2024 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Hasnati, S.Sos., M.Si  
NIP 196801011997022001

Tembusan:  
1. Dekan Fisip Unhas;  
2. Kepala Tata Usaha Fisip Unhas;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.







**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend.Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene  
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/037/1/2024

1. Dasar :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
  4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang :
1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
  2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Nomor : 167/UN4.8.1/PT.01.04/2024 Tanggal 8 Januari 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : NUR AFIFAH SUADI  
Nim : E062222008  
Pekerjaan : Mahasiswi Pascasarjana (S2)  
Alamat : Dusun Bababulo Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene

Untuk melakukan Penelitian di Desa Bababulo Mulai tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan 24 Maret 2024 dengan Proposal berjudul ;

**“ PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA BABABULO KABUPATEN MAJENE “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1(satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan;

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 23 Januari 2024

An. Kepala Badan  
Sekretaris  
  
Hj. NURLIH MALIK, SPI II  
Pangkat : Pembina / IV.a  
NIP. : 19760210 200212 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
KECAMATAN PAMBOANG  
**DESA BABABULO**

Alamat : Jln. Poros Majene – Mamuju Desa Bababulo, KM. 12, KP. 91451

**SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MENELITI**

Nomor : 089/SKet-DBB/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **NUR AFIFAH SUADI**  
NIK : 7605025110990001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Pamboang, 11 Oktober 1999  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin  
Alamat : Dusun Bababulo Desa Bababulo  
Kec. Pamboang Kab. Majene  
Judul Penelitian :

***“Penerapan Prinsip Good Governance Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Bababulo Kabupaten Majene”***

Yang tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bababulo, 17 Mei 2024

Pj. Kepala Desa,  
  
**FADLI, SE**  
Pangkat: Penata Muda Tingkat I/ III.b  
Nip : 19790815 201001 1 020